



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022  
KE PROVINSI SULAWESI TENGAH**

\*

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

\*

**JAKARTA 2022**



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022  
KE PROVINSI SULAWESI TENGAH  
14-18 JULI 2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 28 Maret 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 18 Mei 2022.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Tengah adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Tengah; dan
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

### **D. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

### **E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 14 -18 Juli 2022 dan bertempat di Kabupaten Donggala dan Kota Palu.

### **F. GAMBARAN UMUM LOKASI KUNJUNGAN KERJA**

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi. Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 61.841,29 km<sup>2</sup>.

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Buol Toli-toli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingati sebagai Hari Lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan perkembangan sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat dalam era reformasi yang menginginkan adanya pemekaran wilayah menjadi kabupaten, hingga saat ini berdasarkan pemekaran wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi:

1. Kabupaten Donggala berkedudukan di Banawa;
2. Kabupaten Poso berkedudukan di Poso;
3. Kabupaten Banggai berkedudukan di Luwuk;
4. Kabupaten Tolitoli berkedudukan di Tolitoli;
5. Kota Palu berkedudukan di Palu;
6. Kabupaten Buol berkedudukan di Buol;
7. Kabupaten Morowali berkedudukan di Bungku;
8. Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai;
9. Kabupaten Parigi Moutong berkedudukan di Parigi;
10. Kabupaten Tojo Una-Una berkedudukan di Ampana;
11. Kabupaten Sigi berkedudukan di Sigi Biromaru;
12. Kabupaten Banggai Laut berkedudukan di Banggai; dan
13. Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kolonedale.

Kondisi Geografis Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut:
6. Daratan rendah dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut sekitar 20,20 persen;
7. Wilayah dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut sekitar 27,20 persen;
8. Wilayah dengan ketinggian diatas 500-1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,27 persen; dan
9. Wilayah dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut 25.90 persen.

Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar di pulau Sulawesi, dengan luas wilayah daratan 68.033 km yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta kepulauan Togian di Teluk Tomini dan Kepulauan Banggai di Teluk Tolo, dengan luas wilayah laut adalah 189.480 km. Luas wilayah tersebut merupakan potensi besar yang dapat digunakan untuk pengembangan investasi khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan serta sektor perikanan dan kelautan.

### **Sektor Pertanian**

Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi salah satu sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan perekonomian. Sektor pertanian sangat membantu mencapai pertumbuhan ekonomi daerah. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki lahan pertanian yang cukup besar.

Dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan intervensi kepada sejumlah komoditas unggulan, baik sub sektor tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan. Optimalisasi penyediaan bibit unggul, pupuk, serta teknologi pertanian yang tepat, membangun jaringan infrastruktur yang terkoneksi dari pelabuhan ke kantong-kantong produksi untuk mendukung proses hilirisasi termasuk metode pemasaran yang baik.

Komoditas pertanian telah mendorong pemasukan daerah melalui ekspor seperti komoditas unggulan perkebunan dan hortikultura telah menembus pasar ekspor diantaranya kemiri, kelapa, bawang merah termasuk kakao biji sebanyak 800 dengan nilai Rp22,5 miliar ke negara tujuan Malaysia. Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulteng periode Triwulan III Tahun 2021 konsisten mengalami kenaikan (Grafik 1.5.). NTP di Sulteng mencapai angka 101,76 pada September 2021 yang berarti pendapatan para petani lebih besar dibanding pengeluarannya. Meskipun nilai NTP ini masih di bawah nilai NTP Nasional (105,68 %), namun nilai NTP ini masih melampaui target NTP tahun 2021 sebagaimana tercantum pada RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026 yang sebesar 99,58. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 pada periode yang sama, NTP mengalami kenaikan sebesar 7,17 poin. NTP tertinggi terjadi pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (105,06) dan NTP terendah ada pada Subsektor Hortikultura (94,32).

### **Sektor Kelautan dan Perikanan**

Sektor perikanan merupakan sektor potensial unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah karena mampu menyumbangkan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar Rp8,98 triliun di tahun 2020. Dengan produksi hasil perikanan yang melimpah dan meningkat setiap tahunnya, sektor perikanan mampu memberikan kontribusi secara langsung kepada kesejahteraan para nelayan. Produksi perikanan di tahun 2020 mampu tumbuh sebesar 31,36 ribu ton dibandingkan tahun 2019.

Potensi produk perikanan khususnya udang dan rumput laut di Sulawesi Tengah sangat menjanjikan. Produk unggulan perikanan khususnya jenis udang Vaname banyak dilirik oleh para Investor. Di tahun 2020, produksi udang Vaname bisa mencapai 20 ribu ton. Jenis udang Vaname merupakan salah satu jenis udang yang paling banyak diekspor, khususnya ke Jepang.

### **Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Sulawesi Tengah adalah salah satu Provinsi di Pulau Sulawesi yang mempunyai kekayaan alam yang cukup beragam, kandungan mineral, air

dan segala isinya, serta flora dan fauna yang beraneka ragam. Kawasan lindung di Sulawesi Tengah dengan proporsi 35,55% dari luas total wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, daerah kawasan lindung ini menyebar merata diseluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Jenis kawasan lindung di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kriteria kawasan lindung terdiri dari:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi:
  - a. Kawasan hutan lindung.
  - b. Kawasan resapan air.
2. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
  - a. Sempadan pantai.
  - b. Sempadan sungai.
  - c. Kawasan sekitar danau.
  - d. Kawasan sekitar mata air.
3. Kawasan suaka alam, meliputi:
  - a. Kawasan cagar alam.
  - b. Kawasan suaka marga satwa.
4. Kawasan pelestarian alam, meliputi:
  - a. Kawasan Taman Nasional.
  - b. Kawasan Taman Hutan Rakyat.
  - c. Taman Wisata Alam.
5. Kawasan Cagar Budaya.
6. Kawasan rawan Bencana Alam.
7. Kawasan lindung lainnya meliputi:
  - a. Kawasan taman baru.
  - b. Kawasan pantai berhutan bakau.

Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral serta potensi gas dan minyak bumi. Beberapa kandungan mineral yang menjadi andalan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain: Batubara, Molibdenum, Tembaga, Nikel, Galena, Emas, Chormit, Belerang,

Marmar, Gypsum, Batu Gamping, Posfat, Koalin, Lempung dan Tanah Liat, Batu Giok, Pasir Kuarsa, dan Batu Apung.

## **II. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **A. MENINJAU DAN DISKUSI DI UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I, LABUAN BAJO, KABUPATEN DONGGALA**

Pada kegiatan ini Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan langsung Pelabuhan Perikanan Wilayah I Kabupaten Donggala dan mendapat penjelasan langsung mengenai kondisi pelabuhan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Pemerintah Kabupaten Donggala, dan nelayan.

Di Kabupaten Donggala terdapat sekitar 94 ribu nelayan dengan jumlah kapal penangkapan sekitar 87 unit kapasitas 30 GT. Khusus untuk Kecamatan Banawa, Donggala terdiri dari 16 kecamatan yang rata-rata berada di daerah pesisir.

#### **1. Paparan Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah**

##### **Masalah dan Solusi Peizinan**

- a. Pengurusan Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Perikanan
  - 1) Provinsi Sulawesi Tengah tidak mempunyai Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal;
  - 2) Pemilik kapal tidak dapat memperoleh Surat Persetujuan Berlayar jika tidak mempunyai Sertifikat Kelaikan Kapal;
  - 3) Sebanyak 75% kapal perikanan di Sulawesi Tengah yang sudah kadaluarsa sertifikat kelaikannya;
  - 4) Pemilik kapal tidak dapat melaut dikarenakan ketatnya pengawasan daerah.
- b. Pelayanan Surat Izin Penempatan Rumpon
  - 1) Pemerintah daerah belum dapat mengeluarkan SIPR di bawah 12 mil laut sesuai kewenangannya;



- 2) Proses penerbitan SIPR izin daerah melalui OSS belum ada menunya;
  - 3) Pemerintah Daerah telah mempunyai peraturan daerah terkait dengan retribusi dan diwajibkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui izin penempatan rumpon.
- c. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
- 1) Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah sangat sulit memperoleh Dokumen SHTI yang menjadi salah satu persyaratan ekspor;
  - 2) Pemilik UPI mengurus dokumen SHTI harus ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, yaitu PPS Kendari dan PPN Kuandang;
  - 3) Petugas SHTI Daerah telah mengikuti pelatihan kompetensi di Kementerian Kelautan dan Perikanan akan tetapi belum diberikan akun sebagai penandatanganan kompetensi lokal layanan penerbitan SHTI;
  - 4) Telah mengusulkan nama petugas yang berkompeten menjawab surat DJPT namun sampai saat ini belum memiliki SK sebagai penandatanganan penerbitan SHTI.

**Harapan:**

Agar daerah diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Perikanan, Surat Izin Penempatan Rumpon, dan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

**2. Penangkapan Ikan Terukur**

**Permasalahan:**

- a. Kewenangan perairan laut untuk daerah penangkapan ikan bagi kapal izin daerah hanya dibatasi sampai 12 mill laut, mengakibatkan menurunnya produktivitas nelayan dan menurunnya jumlah produksi yang didaratkan di pelabuhan perikanan;
- b. Terkhusus WPP 713 (Selat Makassar) dan 716 (Laut Sulawesi) 95% kapal beralat tangkap *purse seine* dan *hand line* merupakan izin daerah menangkap ikan di atas 12 mil laut;

- c. Penempatan alat bantu rumpon di WPP 713 (Selat Makassar) dan 716 (Laut Sulawesi) 95 % di atas 12 mill laut.

**Dampak:**

- a. Kuota nelayan lokal terbatas mengakibatkan produktivitas nelayan menurun;
- b. Produksi ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan menurun;
- c. Banyak kapal izin daerah yang tertangkap oleh PSDKP dan APH;
- d. Solusi/harapan kapal berukuran <30 GT yang merupakan izin daerah dapat diperbolehkan menangkap di atas 12 mill laut.

**3. Sistematisa Penerapan Sanksi Administratif dalam UU Cipta Kerja secara Berjenjang**

- a. Diterapkan terhadap pelanggaran persyaratan yang ditentukan dalam izin perikanan diberikan teguran atau peringatan tertulis;
- b. Berupa tindakan sementara untuk menghentikan pelanggaran berupa paksaan Pemerintah;
- c. Berupa pembayaran sejumlah uang berdasarkan peraturan perundang-undangan (denda administratif);
- d. Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki kesalahan atau melakukan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti semula (membekukan perizinan berusaha);
- e. Menghentikan pelanggaran secara permanen terhadap pelaku yang terbukti tidak memiliki komitmen pelestarian SDKP (pencabutan perizinan berusaha).

**Permasalahan:**

- a. Penerapan sanksi denda pada kapal ikan ijin daerah, masih diambil alih oleh Pusat;
- b. Penerapan sanksi denda administratif langsung dikenakan tanpa tahapan teguran administratif.

**Harapan:**

Pengenaan sanksi administrasi sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hendaknya dapat dilaksanakan dan

diimplementasikan sesuai dengan konsep dan semangat yang ada dalam UU Cipta Kerja, yaitu penguatan ekonomi bagi pelaku usaha.

#### 4. Permasalahan dan Saran Tindak Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan

- a. Jumlah kuota BBM belum memenuhi kebutuhan nelayan;
- b. Daya tampung tangki pada SPDN di PPI Donggala sebesar 16 Ton;
- c. Kuota BBM yang diberikan oleh pihak Pertamina hanya sebesar 8 ton perminggu. Dalam sebulan 5 kali pengiriman, sehingga total kuota BBM yang masuk di SPDN PPI Donggala sebesar 40 Ton/bulan;
- d. Kebutuhan BBM dalam 1 bulan sebesar 120 ton, sedangkan kuota yang diberikan hanya 40 ton, sehingga ada kekurangan sebesar sebesar 80 ton;
- e. Rencana pembangunan SPDN, calon pembangun dan pengelola sulit mendapatkan Surat Pendaftaran Rekomendasi dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai salah satu persyaratan ke Pertamina. (Permasalahan PPP. Ogotua sudah setahun belum memperoleh Surat Pendaftaran Rekomendasi dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;)
- f. Harapan secepat mungkin dilakukan penambahan kuota BBM Minimal 2 kali pengiriman dalam seminggu sebesar 16 ton.

#### 5. Estimasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar bagi Kapal Perikanan di WKOPP Pelabuhan Perikanan Donggala

I. DATA KAPAL PERIKANAN						
NO.	JENIS/UKURAN KAPAL	JUMLAH KAPAL (BUAH)	KETERANGAN			
1	2	3	4			
1.	> 5 GT	350	Kapal di WKOPP PPI Donggala			
2.	5 – 10 GT	120				
4.	11 - 30 GT	75				
TOTAL JUMLAH KAPAL :		545				

II. JUMLAH KEBUTUHAN BBM KAPAL PEIKANAN PER TRIP MELAUT DAN KEBUTUHAN BBM DALAM SATU BULAN						
NO	JENIS/UKURAN KAPAL	JUMLAH KAPAL (BUAH)	KEBUTUHAN BBM /KAPAL/ TRIP (LITER)	JUMLAH HARI /TRIP/KAPAL (HARI)	TOTAL KEBUTUHAN BBM SEMUA KAPAL/TRIP (LITER)	TOTAL KEBUTUHAN BBM SEMUA KAPAL./ BULAN (LITER)
1.	> 5 GT	350	80	2 – 3	28.000	25.000
2.	5 – 10 GT	120	180	4 – 7	30.000	30.000
3.	11 - 30 GT	75	500	5 – 8	41.250	65.000
JUMLAH KEBUTUHAN :		545			99.250	120.000/ Bulan

## 6. Kerusakan Pelabuhan Perikanan Donggala Akibat Bencana Alam Tahun 2018

### Pangkalan Pendaratan Ikan Donggala:

- Dermaga Utama Panjang 150 Meter Lebar 8 Meter.
- Kerusakan Jalan Kompleks PPI Donggala.
- Dermaga Pemuatan dan Tambat Kapal Pancing.
- Kerusakan Drainase Pelabuhan Perikanan.

### Harapan/Solusi:

Membutuhkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas yang rusak (proposal terlampir).

## 7. Rencana Kebutuhan Anggaran Pembangunan dan Rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Sulteng

Total kebutuhan anggaran pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan Rp156.550.000.000,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

No	Lokasi Pelabuhan	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
<b>A</b>	<b>PP. Mato Kabupaten Banggai Laut</b>				<b>15,200,000,000</b>
		Pembangunan Pagar	1 Paket	500,000,000	500,000,000
		Tambahan Dermaga	1 Paket	8,000,000,000	8,000,000,000
		Pintu Gerbang	1 Paket	250,000,000	250,000,000
		Mess Nelayan	1 Paket	1,500,000,000	1,500,000,000
		Jalan Komplek	1 Paket	2,500,000,000	2,500,000,000
		Drainase	1 Paket	1,000,000,000	1,000,000,000
		Kantin	1 Paket	450,000,000	450,000,000
		SPDN	1 Paket	1,000,000,000	1,000,000,000
<b>B</b>	<b>PPI Donggala Kabupaten Donggala</b>				<b>65,250,000,000</b>
		Penahan Gelombang (Breakwater) - Provinsi	1 Paket	22,500,000,000	22,500,000,000
		Turap Penahan Tanah (revetment) -Provinsi	1 Paket	5,200,000,000	5,200,000,000
		Dermaga - Provinsi	1 Paket	5,200,000,000	5,200,000,000
		Kolam Pelabuhan - Provinsi	1 Paket	21,600,000,000	21,600,000,000
		Dreainase - Provinsi	1 Paket	1,500,000,000	1,500,000,000
		Tempat Pemasaran Ikan (TPI Higienis) Provinsi	1 Paket	3,000,000,000	3,000,000,000
		Fasilitas Air (Tawar) Bersih-Provinsi	1 Paket	1,250,000,000	1,250,000,000
		Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo)-Provinsi	1 Paket	1,500,000,000	1,500,000,000
		Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)-Provinsi	1 Paket	2,500,000,000	2,500,000,000
		Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan	1 Paket	1,000,000,000	1,000,000,000
<b>C</b>	<b>PPI Pagimana Kabupaten Banggai</b>				<b>49,400,000,000</b>
		Pengembangan Kampung Nelayan Maju Desa Jaya Bakti Kecamatan PagimanaKabupaten Banggai	1 Paket	1,000,000,000	1,000,000,000
		Rehab Kawasan Pelabuhan	1 Paket	5,000,000,000	5,000,000,000
<b>D</b>	<b>PP Lafeu Kabupaten Morowali</b>				<b>23,700,000,000</b>
		Land Clearing	1 Paket	750,000,000	750,000,000
		Talud	1 Paket	6,000,000,000	6,000,000,000
		Reklamasi	1 Paket	5,450,000,000	5,450,000,000
		Pagar	1 Paket	1,000,000,000	1,000,000,000
		Pabrik Es	1 Paket	3,000,000,000	3,000,000,000
		SPDN	1 Paket	1,000,000,000	1,000,000,000
		Cold Stroge	1 Paket	2,500,000,000	2,500,000,000
<b>E</b>	<b>PPP Ogotua Kabupaten Toitoli</b>				<b>2,000,000,000</b>
		Pengembangan Kampung Nelayan Maju Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Banggai	1 Paket	1,000,000,000	1,000,000,000
		SPDN	1 Paket	1,000,000,000	1,000,000,000

## 8. Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Disulawesi Tengah

### Komoditas Unggulan yang Dikembangkan sesuai Road Map Tahun 2011-2025

01	Budidaya Rumput Laut Cottonii : 4 %	4,72
02	Budidaya Rumput Laut Gracilaria : 7,8 %	9,25
03	Budidaya Udang : 24 %	28,32
04	Penangkapan Ikan Pelajik Besar : 63 %	74,34
05	Penangkapan Ikan Pelajik Kecil : 47 %	55,46
06	Penangkapan Ikan Demersal : 68 %	80,24
07	Penangkapan benih Sidat : 30 %	35,4

#### Aspirasi yang Disampaikan:

- Nelayan mengeluhkan terjadinya kelangkaan BBM;
- Pelabuhan Donggala kondisinya sudah sangat parah sehingga perlu dilakukan perbaikan;
- Pelabuhan Donggala perlu dilakukan perluasan karena sudah tidak mampu menampung kapal-kapal nelayan yang jumlahnya semakin banyak;
- Nelayan mengeluhkan permasalahan pengurusan izin kelayakan, setelah terjadi perpindahan dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengurus izin kelayakan menjadi lebih rumit. Mohon pengurusan izin kelayakan diserahkan kepada pemerintah daerah agar memudahkan nelayan.;
- Nelayan meminta agar tidak ada batas penangkapan ikan bagi nelayan berdasarkan besaran kapal penangkapan, misalnya di bawah 30 GT hanya boleh menangkap ikan sampai dengan 12 mil.

## 9. Tanggapan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Perhalihan izin kelayakan dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. BBM bersubsidi dari Pemerintah sejumlah 2 juta ton, namun yang tersalur baru 600 ribu per tahun;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyetujui bahwa nelayan dengan kapal 5 GT akan diberikan kemudahan;
4. Perlu adanya perbaikan sistem penyaluran BBM bersubsidi;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mendorong pengajuan BBM agar dilakukan per tahun.

## **B. DISKUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PT VALE INDONESIA BLOK BAHODOPI, KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH**

### **1. Profil PT Vale Indonesia**

PT Vale Indonesia Tbk. atau PT Vale (sebelumnya bernama PT International Nickel Indonesia Tbk.) merupakan perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. PT Vale merupakan bagian dari Vale, perusahaan multi-tambang asal Brazil. PT Vale menambang nikel *laterit* untuk menghasilkan produk akhir berupa nikel dalam *matte*. Volume produksi nikel PT Vale rata-rata mencapai 75.000 metrik ton per tahunnya. PT Vale menggunakan teknologi pyrometalurgi atau teknik *smelting*.

PT Vale Indonesia Tbk. merupakan perusahaan tambang Penanaman Modal Asing (PMA) dalam naungan Kontrak Karya (KK) yang telah diamandemen pada 17 Oktober 2014 dan berlaku hingga 28 Desember 2025. Salah satu poin renegotiasi adalah pengurangan wilayah Kontrak Karya dari sebelumnya seluas 190.510 hektar menjadi 118.435 hektar. Selanjutnya, pada Maret 2017, PT Vale melepaskan wilayah seluas 418 hektar yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan terpadu mandiri. Dengan demikian, luas wilayah operasi PT Vale saat ini adalah 118.017 hektar

meliputi Sulawesi Selatan (70.566 hektar), Sulawesi Tengah (22.699 hektar), dan Sulawesi Tenggara (24.752 hektar).

## **2. Program Keberlanjutan PT Vale Indonesia Tbk**

PT Vale mengoptimalkan energi baru dan terbarukan dengan memiliki tiga PLTA, yakni PLTA Larona 165 MW (beroperasi 1979), PLTA Balambano 110 MW (1999), dan PLTA Karebbe 90 MW (2011). 38% konsumsi energi operasional PT Vale bersumber dari energi terbarukan. Keberadaan PLTA ini berkontribusi mereduksi rata-rata emisi karbon sebesar 500.000 ton CO<sup>2</sup>eq per tahunnya.

PT Vale mengintegrasikan pembukaan lahan tambang dengan pemulihan lahan dan penanaman kembali. Untuk kebutuhan tersebut PT Vale telah mendirikan kebun bibit modern yang dioperasikan sejak April 2006. Fasilitas seluas 2,5 hektar mampu memproduksi rata-rata 700.000 bibit dan merehabilitasi lebih 100 ha lahan purna tambang setiap tahun. Pada tahun 2014 PT Vale menginvestasikan AS\$3,5 juta untuk membangun 80 kolam pengendapan dan fasilitas pengolahan air limbah berteknologi *Lamella Gravity Settler* yang merupakan pertama di industri pertambangan di Indonesia.

Di aspek sosial PT Vale menjalankan program pemberdayaan berbasis jangka panjang (berkelanjutan) melalui kemitraan tiga pilar (Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat) melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) berbasis Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM). Penerapan *good corporate governance* (GCG) mengedepankan keterbukaan dan transparansi untuk menghindarkan bisnis dari risiko korupsi dan suap. PT Vale menjalankan manual antikorupsi yang bersifat mengikat di lingkup internal dan rekanannya.

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atas kegiatan PT Vale Indonesia Tbk di Blok Bahodopi meliputi kegiatan-kegiatan eksplorasi bijih nikel dan studi geologiteknik. Kegiatan-kegiatan tersebut telah terlindungi dalam dokumen AMDAL Bahodopi yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia AMDAL Bahodopi

dengan Izin Lingkungan No. B-10254/Ro.Hkm&Hms/LH/PDAL/09/2013.

Kegiatan eksplorasi bijih nikel pernah dihentikan sejak akhir Oktober 2011 sehubungan dengan terbitnya surat perintah penghentian kegiatan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Nomor S.506/IV-KKBHL/2011 tanggal 28 Oktober 2011. Lokasi kegiatan tersebut berada di kawasan hutan sehingga memerlukan izin khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan yang dihentikan selain kegiatan fisik juga termasuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. PT Vale telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 14.101,11 ha untuk kegiatan eksplorasi pada bulan Juni 2014 lalu, sehingga kegiatan eksplorasi di Blok II dan Blok III Bahodopi sudah dimulai kembali sejak semester satu (1) tahun 2015.

Juni 2020 aktivitas kembali terhenti disebabkan IPPKH Eksplorasi blok Bahodopi yang diharapkan perpanjangan IPPKH bisa didapatkan kembali sesegera mungkin agar kegiatan eksplorasi bisa berjalan kembali di area Blok II dan III Bahodopi. Sementara itu IPPKH untuk Eksploitasi juga dalam proses pengurusan, diharapkan kegiatan fisik lanjutan dapat segera dimulai setelah perizinan kehutanan IPPKH Eksploitasi tersebut didapatkan. Sementara kegiatan studi geologiteknik masih berlangsung sampai akhir semester dua (2) tahun 2021 dikarenakan area aktivitas berada di luar kawasan hutan, sehingga pelaksanaan kegiatan fisik lapangan dapat dilanjutkan tanpa perlu menunggu izin kehutanan.

TIM Komisi IV DPR RI didampingi pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan diskusi dengan PT Vale Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah (Prov. Sulteng), Dinas Kehutanan Prov. Sulteng, dan Bupati Kabupaten Morowali beserta jajarannya, terkait pengelolaan lingkungan dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT Vale Indonesia di Kabupaten Morowali.



### 3. Pertanyaan Anggota Komisi IV DPR RI

- a. Komisi IV DPR RI meminta semua *stakeholder* duduk bersama berdiskusi dan mengevaluasi terkait kebijakan izin lingkungan bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Morowali;
- b. Komisi IV DPR RI meminta komitmen dan keberanian Ditjen GAKKUM KLHK untuk menegakkan peraturan lingkungan dan menindak perusahaan tambang yang merusak dan mencemari lingkungan di Kabupaten Morowali dan Sulawesi Tengah pada umumnya;
- c. Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih terbuka (kerterbukaan data) dan melaporkan perusahaan tambang yang merusak dan mencemari lingkungan, sehingga dapat dicarikan solusi pencegahan, pengendalian, serta penyelesaian permasalahan lingkungan di Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Perlu mendapatkan penjelasan terkait kebijakan dan komitmen lingkungan serta langkah-langkah strategis untuk mewujudkan penambangan yang berwawasan lingkungan di PT Vale Indonesia Tbk.;
- e. Perlu mendapatkan penjelasan terkait Sistem Manajemen Lingkungan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, serta Kepatuhan Lingkungan terkait perizinan, pelaporan, pemenuhan parameter baku mutu, dan pemenuhan ketentuan teknis yang menjadi tanggung jawab PT Vale Indonesia Tbk.;
- f. Perlu mendapatkan penjelasan terkait Rencana Pemulihan Lingkungan, Rencana Reklamasi Eksplorasi, Operasi Produksi maupun Operasi Pasca-Tambang, Rencana Rehabilitasi Lahan, serta Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT Vale Indonesia, Tbk.;
- g. Perlu mendapatkan penyampaian laporan kinerja lingkungan, RKL-RKL tahun 2021 dan RKL-RPL Q1 tahun 2022, Dokumen

Rencana Reklamasi (Dokumen RR), Dokumen PPKH yang telah disetujui oleh instansi terkait di semua area kerja PT Vale Indonesia.

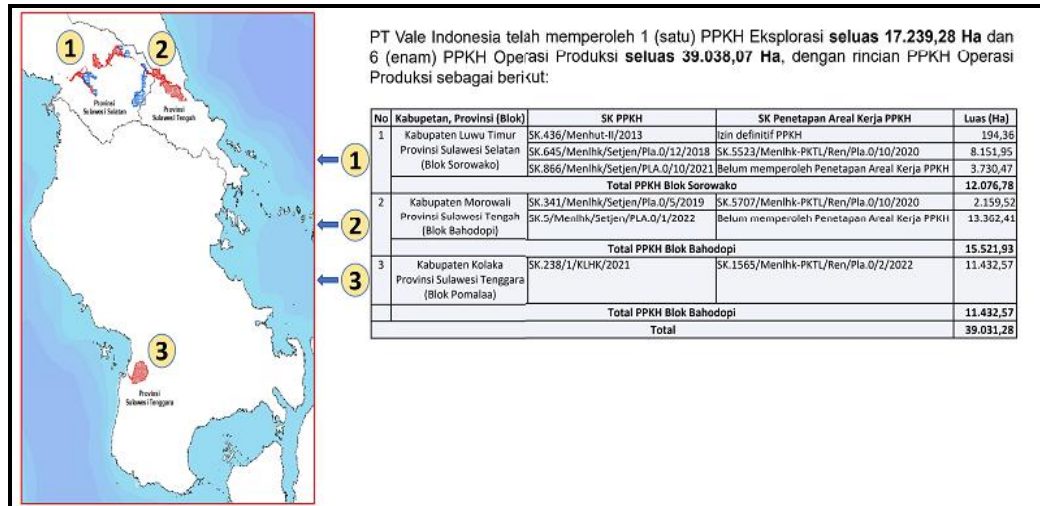
- h. Perlu mendapatkan penjelasan terkait Kontribusi PT Vale Indonesia dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pendekatan terintegrasi dalam rencana penggunaan lahan;
- i. Perlu mendapatkan penjelasan dari PT Vale Indonesia terkait luasan PPKH yang diperoleh sebesar 39.031,28 ha. Dengan luasan tersebut apakah sudah termaksimalkan, berapa persen dalam hal pemanfaatannya? Kepada KLHK, apa yang menjadi dasar untuk mendapatkan luasan PPKH tersebut untuk PT Vale Indonesia, hal ini menyebabkan tidak adanya kesempatan bagi pengusaha lokal (putra daerah) untuk berkontribusi/kesempatan berusaha dan memunculkan pertambangan ilegal, karena tidak adanya kuota PPKH di Kabupaten Morowali;
- j. Akibat keluarnya PPKH/IPPKH seluas 13.000 ha berarti telah menutup kuota untuk seluruh wilayah Morowali. Sehingga IUP-IUP yang sudah dikeluarkan oleh Pemda dan masuk ke dalam kawasan hutan tidak bisa diterbitkan PPKH/IPPKH baru. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan bertentangan dengan rencana Pemerintah Indonesia meningkatkan pendapatan dari pertambangan mineral dan ekspor produk nikel. Jika IUP-IUP melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa PPKH/IPPKH maka terjadi pelanggaran di dalam kawasan hutan (Kasus Pidana);
- k. Beberapa IUP milik pengusaha daerah tidak bisa melakukan kegiatan eksploitasi nikel karena IUP-IUP yang dimiliki hampir sebagian besar di dalam kawasan hutan, berbeda dengan PT Vale Indonesia yang memiliki IUP sangat luas;
- l. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Morowali mengajukan keberatan kepada Komisi IV DPR RI karena banyak IUP milik warga lokal tidak bisa melakukan kegiatan penambangan. Tetapi banyak pemilik IUP yang bukan warga asli alias pendatang yang

melakukan penambangan ilegal di dalam kawasan hutan, sedangkan IUP milik pengusaha lokal belum dieksploitasi karena mengikuti aturan yang ada.

- m. PPKH/IPPKH sudah keluar pada bulan Januari 2022 namun belum selesai menjalankan semua kewajiban yang melekat, yaitu tata batas, Penetapan Area Kerja (PAK), dan membayar PNBP penggunaan kawasan hutan. Terinfo saat ini PT Vale Indonesia sudah mendapatkan dokumen Rencana Penataan Batas (belum melakukan tata batas). Artinya peluang melakukan revisi luas PPKH/IPPKH relatif lebih mudah daripada ketika perusahaan menyelesaikan Penetapan Areal Kerja (PAK) dan pembayaran PNBP;
- n. Perlu mendapatkan penjelasan terkait sisa waktu 3 tahun berakhirnya masa kontrak karya PT Vale Indonesia tahun 2025, apakah PT Vale mampu menyelesaikan dan memaksimalkan lahan PPKH 13.000 ha di Kabupaten Morowali.

#### **4. Tanggapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)**

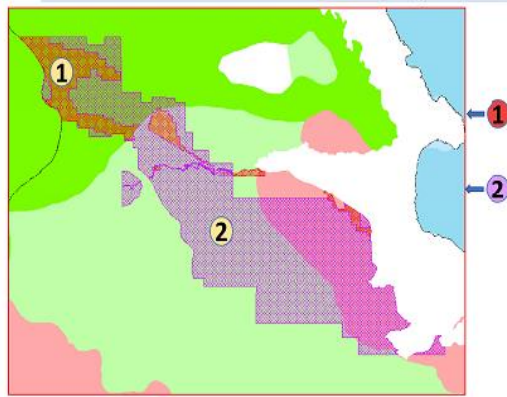
- a. PT Vale Indonesia telah memperoleh 1 (satu) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi seluas 17.239,28 ha dan 6 (enam) PPKH Operasi Produksi seluas 39.038,07 ha, total secara keseluruhan 39.031,28 ha, yang tersebar di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian PPKH Operasi Produksi sebagai berikut:
  - 1) Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (Blok Sorowako) seluas 12.076,78 ha;
  - 2) Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara (Blok Pomalaa) seluas 11.432,57 ha.
  - 3) Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Blok Bahodopi) seluas 15.521,93 ha.



Gambar: Peta dan Tabel Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT Vale Indonesia

Sumber: Ditjen PKTL-KLHK, Juli 2022

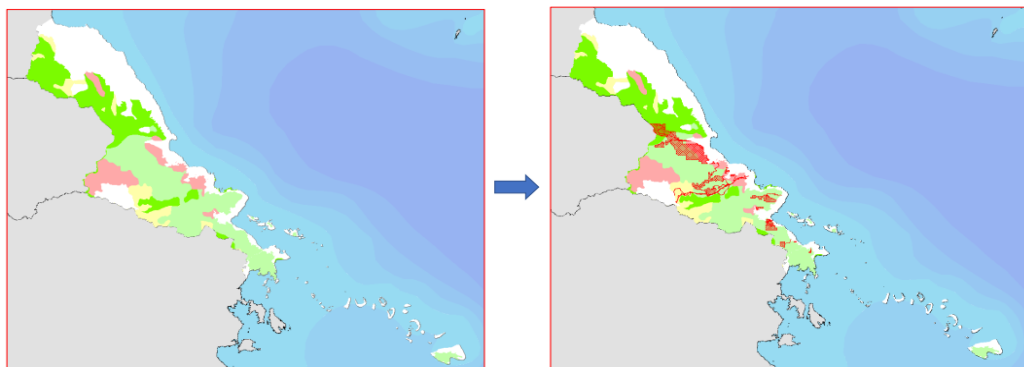
- b. Pemenuhan Kewajiban PPKH PT Vale Indonesia terkait realisasi penanaman DAS di Blok Sorowako yang belum mencapai target yang diharapkan, pengusulan lokasi penanaman DAS di blok Bahodopi, dan Blok Pomalaa.
- c. PT Vale Indonesia telah memperoleh 2 (dua) PPKH Operasi Produksi pada Blok Bahodopi di Kabupaten Morowali yang berada pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit XIV Provinsi Sulawesi Tengah seluas 15.521,93 ha, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Keputusan Menteri LHK Nomor SK.341/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2019 dan telah mendapatkan penetapan batas areal kerja sesuai Keputusan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri LHK Nomor SK.5707/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/10/2020, seluas 2.159,52 ha.
  - 2) Keputusan Menteri LHK Nomor SK.5/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2022 dan belum mendapatkan penetapan batas areal kerja, seluas 13.362,41 ha.



Gambar: Peta PPKH Operasi Produksi PT Vale Indonesia Blok Bahodopi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber: Ditjen PKTL-KLHK, Juli 2022

- d. Ketentuan terkait kuota PPKH dalam areal KPH, didasarkan pada ketentuan Pasal 372, Ayat (1), (5), (6), (7), (10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- e. Luas KPH Tepe Asa Moroso Unit XIV Bebas PBPH 184.340,41 ha, maka kuota PPKH Kab. Morowali seluas 18.434,04 ha atau 10% dari total luas KPH. Sedangkan beban PPKH saat ini di Kabupaten Morowali sebesar 21.759,67 ha. dengan demikian sisa kuota seluas 3.325,63 ha atau Kab. Morowali tidak memiliki sisa kuota PPKH bahkan minus.



No	Luas Kawasan Hutan (Ha) (HL, HPT, HP, dan HPK)	Luas KPH Tepe Asa Moroso Unit XIV (Ha)	Luas KPH Tepe Asa Moroso Unit XIV Bebas PBPH (Ha)	Kuota (Ha)	Beban PPKH (Ha)	Sisa Kuota (Ha)
1	252.101,08	251.958,31	184.340,41	18.434,04	21.759,67	-3.325,63

Gambar: Peta dan Tabel Kondisi Kawasan Hutan dan Sebaran PPKH Kabupaten Morowali

Sumber: Ditjen PKTL-KLHK, Juli 2022

## 5. Aspirasi dan Tanggapan Pemerintah Kabupaten Morowali

- a. Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah yang dikenal sebagai daerah tambang dengan berbagai konsekwensi yang ditimbulkan;
- b. Isu lingkungan dampak dari kegiatan pertambangan, merupakan isu yang sangat krusial dan memprihatinkan serta perlu mendapatkan perhatian yang serius di Kab. Morowali, banyaknya Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan menyebabkan masalah kerusakan lingkungan di Kab. Morowali, untuk itu perlu dicarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- c. Isu perizinan IUP di Kab. Morowali, ada 2 (dua) permasalahan terkait izin pertambangan yaitu:
  - 1) Tumpang-tindih perizinan, sebagai contoh dalam satu objek yang sama dimiliki 2 (dua) IUP dan BUMS yang berbeda.
  - 2) IUP Palsu, merupakan IUP yang terbit tanpa sepengetahuan pemerintah daerah Kab. Morowali.
- d. Tingginya jumlah penambangan yang dilakukan tanpa dilengkapi IUP (*illegal mining*) yang mendapatkan “bekingan” oknum-oknum tertentu, merupakan penyumbang kerusakan lingkungan terbesar di Kabupaten Morowali, dikarenakan kegiatan *illegal mining* yang tidak memiliki komitmen lingkungan serta merugikan negara dari sisi pajak dan kewajiban keuangan lainnya.
- e. Berdasarkan regulasi yang ada bisa mendapatkan kuota 10% dari total luasan kawasan hutan di Kabupaten Morowali untuk usaha, namun dengan hadirnya usaha pertambangan dan kawasan industri di Kab. Morowali maka kuota 10% tersebut hanya menyisakan 5000 ha, di sisi lain masyarakat Kab. Morowali sangat membutuhkan lahan untuk usaha perkebunan, IUP bagi pengusaha lokal, serta kegiatan usaha lain yang berbasis lahan lainnya.

- f. Pengajuan penurunan status lahan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap lahan hutan yang telah diolah atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perkebunan dan kebutuhan lainnya, hal ini telah mendapatkan persetujuan oleh KLHK dan segera akan ditindaklanjuti.
- g. Kebutuhan lahan hutan untuk stabilitas pertahanan dan keamanan, dalam hal ini kebutuhan lahan untuk Kompi Senapan B TNI-AD sebesar 100 ha, lahan tersebut berada pada kawasan hutan yang membutuhkan kebijakan penurunan status.
- h. Apresiasi terhadap kehadiran pertambangan dan industri di Kabupaten Morowali, telah memberikan kontribusi yang besar kemajuan ekonomi masyarakat Kab. Morowali, salah satu contohnya kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi 61.000 pekerja yang berasal dari Kabupaten Morowali dan dari daerah lain dari seluruh Indonesia serta menjadi pemicu positif sektor ekonomi lainnya seperti sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata.

#### **6. Aspirasi dan Tanggapan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah**

- a. Ribuan hektar kebun lada dan peruntukkan lainnya oleh masyarakat berada di dalam kawasan PPKH PT Vale Indonesia, perlu menjadi perhatian karena di masa yang akan datang berpotensi terjadinya konflik sosial.
- b. Adanya beberapa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Morowali yang belum mengantongi izin lingkungan dan izin usaha namun telah beroperasi.
- c. Tingginya penambangan ilegal oleh masyarakat diakibatkan oleh tidak adanya keberpihakan Pemerintah memberikan ruang dari sisi regulasi untuk berusaha bagi masyarakat di bidang pertambangan.
- d. Kuaota PPKH di Kabupaten Morowali masih tersedia, oleh karena PT Vale termasuk 13 perusahaan menurut Kepres Nomor 41 Tahun 2004 yang dikecualikan dari kuota 10%, menurut Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 372 Ayat (10), Huruf (e).

- e. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk memperkuat Ditjen GAKKUM-KLHK.

**7. Paparan Pengelolaan Lingkungan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan PT Vale Indonesia Blok Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah**

- a. Misi PT Vale Indonesia, mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Pengelolaan lingkungan PT Vale telah mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO14001:2015 dan beberapa penghargaan dari Pemerintah



PT Vale berhasil meraih predikat **PROPER HIJAU** dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019 dan 2021, sebagai Satu-satunya perusahaan penambangan dan pemrosesan nikel yang mendapatkan GREEN Proper



**Good Mining Practice**

Pada tahun 2021, PT Vale Indonesia berhasil mendapatkan beberapa penghargaan "good mining practice" dari Kementerian ESDM, diantaranya:

1. Penghargaan "**UTAMA**" Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2020 dan 2021
2. Penghargaan "**ADITAMA**" Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2020 dan 2021
3. Penghargaan "**ADITAMA**" pada 2020 dan "**UTAMA**" pada 2021 terkait Pengelolaan Konservasi Mineral dan Batubara



- c. PT Vale Indonesia mengurangi beban air limpasan tambang dengan *Lamella Gravity Settler* (LGS) teknologi pertama di Indonesia - hasil riset dan kerja sama dengan BPPT.

**Mengurangi beban air limpasan tambang dengan *Lamella Gravity Settler* (LGS) teknologi pertama di Indonesia - hasil riset dan kerjasama dengan BPPT**



Studi LGS dilakukan bersama BPPT selama 2 tahun. Teknologi ini biasa diterapkan untuk penjernihan air untuk bahan baku air minum



<b>INLET</b> TSS : 1707 mg/L Cr tot : 10 mg/L	<b>OUTLET</b> TSS : 8 mg/L Cr tot : 0.3 mg/L
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------



- d. PT Vale Indonesia yang beroperasi di sekitar Danau Matano dan Malili selama kurang lebih 50 tahun namun mampu menjaga



kejernihan air danau dan ekosistem serta keanekaragaman hayati danau.

**Kegiatan pertambangan pada lingkungan yang sensitif selama separuh abad**

Setelah 50 tahun menambang di sekitar Danau Matano, air danau masih terjaga kejernihannya.

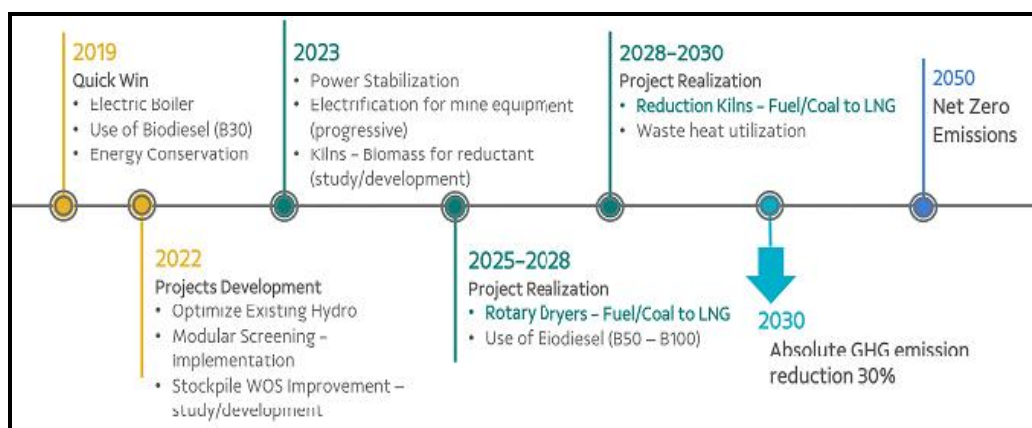


	Standar Pemerintah untuk Air Minum	Air Mineral	Danau Matano
Total padatan terlarut (mg/l)	500	320	138

Sistem Danau Malili memiliki tingkat endemi yang tinggi. Banyak spesies yang hidup dan hanya bisa ditemukan di area ini. Bahkan beberapa hanya hidup di salah 1 dari 3 danau yang merupakan bagian dari sistem danau Malili



- e. Pabrik Sorowako adalah pabrik nikel RKEF dengan karbon intensitas terendah di Indonesia, PT Vale membangun dan mengoperasikan 3 PLTA dengan kapasitas 365 MW dan berkontribusi terhadap 36% total energi yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Operasi 3 PLTA ini mengurangi emisi CO2 lebih dari 1 juta ton CO2eq setiap tahun.
- f. PT Vale berkomitmen mengurangi emisi karbon sebesar 33% untuk scope 1 dan 2 pada 2030 dan net zero di 2050:



- g. Capaian reklamasi pascatambang PT Vale Indonesia:



h. Reforestasi di luar area Kontrak Karya PT Vale Indonesia:



i. PT Vale Indonesia turut serta dalam program Pemerintah untuk membangun persemaian skala besar kapasitas produksi 5 juta bibit per tahun di 2 (dua) provinsi yaitu: Kabupaten Bahodopi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

## 8. Tanggapan PT Vale Indonesia atas pertanyaan Anggota Komisi IV DPR RI terkait Pengelolaan Lingkungan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

a. Setelah berakhirnya Kontrak Karya PT Vale Indonesia tahun 2025, secara regulasi Kontrak Karya akan berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimana pemegang saham mayoritas (51%) dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

- b. Berdasarkan pengalaman di Kab. Luwu Timur, PT Vale Indonesia mampu menyelesaikan kewajiban PPKH seluas 11.000-an ha. dalam waktu 10 (sepuluh) bulan dalam waktu 10 bulan.
- c. Langkah-langkah setelah PT Vale Indonesia mendapatkan PPKH:
  - 1) Penetapan area kerja dilaksanakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
  - 2) Verifikasi lapangan dilanjutkan pembuatan berita acara serah terima;
  - 3) Inventarisasi tegakan dilanjutkan verifikasi serah terima; dan
  - 4) Proses pembayaran PNBPN.Setelah semua kewajiban terpenuhi, maka dilanjutkan dengan:
  - 1) Pembangunan infrastruktur penambangan seperti jalan, kolam pengendapan, dan segala perimeter untuk penyangga lingkungan;
  - 2) Memetakan aliran limpasan tambang; dan
  - 3) Memastikan titik kepatuhan untuk mengecek baku mutu air sebelum air masuk ke badan air.
- d. Komitmen lingkungan PT Vale Indonesia terhadap pengelolaan air limpasan, sebelum air limpasan dilepaskan ke badan air terlebih dahulu dikelola, sehingga air yang masuk ke badan air telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- e. Pengelolaan lingkungan PT Vale Indonesia menggunakan online monitoring system;
- f. Dari sisi pabrik PT Vale Indonesia telah menerapkan dan menggunakan alat pengontrol debu standar *World Bank* untuk kualitas udara di sekitar pabrik;
- g. Reklamasi pascatambang PT Vale Indonesia, merupakan salah satu perusahaan tambang mineral yang memiliki capaian reklamasi 10 terbesar dimana 9 lainnya merupakan perusahaan tambang batu bara, capaian reklamasi tahun 2020 sebesar 183 ha, tahun 2021 sebesar 283 ha, dan akan terus dipertahankan sampai dengan 2025 sebesar 290 ha sampai dengan 300 ha per tahun;

- h. Keaneragaman hayati, PT Vale Indoensia menanam jenis tanaman endemik lokal seperti jenis Eboni, Kayu Putih, dan tanaman buah lokal;
- i. Rehab DAS merupakan obligasi PT Vale Indonesia kepada Pemerintah dan telah dilaksanakan sekitar 10.000 ha, dimulai tahun 2020, penanaman dilakukan pada tahun 2021 dan tahun 2022 proses perawatan tanaman yang ditanam, diharapkan tahun 2024 sudah dapat diserahkan kepada Pemerintah, di saat yang sama PT Vale Indonesia mengagendakan rehab DAS sebesar 4.600 ha. yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.  
Dokumen RKL-RPL disampaikan secara berkala kepada pemerintah, PT Vale Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan tambang nikel yang mendapatkan *award green proper*.

### **C. KUNJUNGAN DAN DISKUSI DI BALAI KARANTINA PROVINSI SULAWESI TENGAH TERKAIT PANGAN DAN PMK**

Tim Komisi IV DPR RI melakukan pertemuan dan diskusi bersama dengan Balai Karantina Parovinsi Sulawesi Tengah, Walikota Palu, Bupati Tolitoli, Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Palu, Balai Veteriner Maros, unsur Forkompimda Provinsi Sulawesi Tengah, mitra kerja Komisi IV DPR RI, dan seluruh stakeholder terkait.

Tim Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan terkait penyebaran dan langkah-langkah penanganan dan hambatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal penting yang menjadi catatan adalah Provinsi Sulawesi Tengah masih zero kasus PMK, namun perlu dilakukan pencegahan dan penanganan untuk mengantisipasi masuknya PMK ke wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, mengingat daerah perbatasan dengan Sulawesi Selatan sudah ditemukan ternak warga yang terjangkit PMK, yakni di daerah Toraja.

#### **1. Paparan Badan Karantina Provinsi Sulawesi Tengah**

- a. Potensi Komoditas Pertanian Sektor Peternakan Sulawesi Tengah
  - 1) Sapi: 434.070 ekor.

- 2) Kambing: 588.009 ekor.
  - 3) Kuda: 1.099 ekor.
  - 4) Kerbau: 3.086 ekor.
  - 5) Ayam Buras: 5.118.732 ekor.
  - 6) Ayam Petelur: 1.263.744 ekor.
  - 7) Ayam Pedaging: 7.982.304 ekor.
  - 8) Itik: 1.244.398 ekor.
  - 9) Itik Manila: 96.541 ekor.
  - 10) Puyuh: 47.475 ekor.
  - 11) Kelinci: 1.774 ekor.
- b. Lalu Lintas Hewan Ternak
- 1) Pengeluaran tahun 2021
    - a) Kambing: 12.438 ekor, 297 kali asal: Palu, Sigi, Tolitoli, Touna. Tujuan Berau, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, dan Gorontalo.
    - b) Kerbau: 6 ekor, 2 kali asal: Palu, Donggala, Tolitoli, dan Gorontalo. Tujuan: Berau, Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan.
  - 2) Pengeluaran Tahun 2022
    - a) Kambing: 5.386 ekor, 175 kali. Asal: Palu, Tolitoli, Touna. Tujuan: Berau, Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan.
    - b) Sapi: 9.613 ekor 160 kali. Asal: Palu, Donggala, Tolitoli, dan Gorontalo. Tujuan: Berau, Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan.
- c. Kewaspadaan PMK
- 1) Masa karantina 14 hari pemberlakuan masa karantina bagi hewan ternak yang akan dilalulintaskan.
  - 2) Pembentukan Satgas Internal PMK Internal BKP Palu telah dibentuk tim Satgas terkait PMK.
  - 3) Sinergi bersama melakukan koordinasi dan sinergi bersama dengan Polda Sulteng dan Pemda terkait kewaspadaan PMK.

- 4) Pengawasan *check point* dan pelabuhan pengawasan pada *check point* perbatasan jalur darat dan pelabuhan yang ditetapkan maupun yang belum.
  - 5) Koordinasi dengan Wagub Sulteng terkait perkembangan kewaspadaan PMK di Sulawesi Tengah.
  - 6) Koordinasi dengan Dinas Peternakan Kab. Donggala terkait penguatan kewaspadaan PMK khususnya lalin ternak yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat.
  - 7) Koordinasi kewaspadaan PMK dengan UPT Kesmavet Sulawesi Tengah, Kepala UPBU MSA, dan Polda Sulteng Biro OPS.
  - 8) Koordinasi secara online dengan seluruh UPT Barantan terkait kejadian PMK.
  - 9) Koordinasi secara online dengan seluruh Dinas Peternakan seluruh Sulawesi Tengah.
  - 10) Peninjauan Pos Ternak di Kab. Donggala yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat.
  - 11) Pemeriksaan sapi saat masa karantina di IKH pemilik di Simpang Raya, Kab. Banggai.
  - 12) Patroli pengawasan di Pelabuhan pengeluaran ternak ke Kalimantan sejak diberlakukannya pelarangan lalin ternak sesuai edaran Mentan RI dan Gubernur Sulawesi Tengah.
  - 13) Penolakan daging sapi 11 kilogram dari Surabaya tanpa dilengkapi sertifikat karantina, di bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk.
- d. Sosialisasi Kewaspadaan PMK
- 1) *Talk show* pada program TVRI Klik Indonesia Pagi, terkait PMK.
  - 2) Pemasangan spanduk kewaspadaan PMK di Wilker Pagimana.
  - 3) Pemasangan spanduk kewaspadaan PMK di Wilker Luwuk & IKH Pemilik di Ds. Toili.
  - 4) Pemasangan spanduk kewaspadaan PMK di Pelabuhan Wani.
  - 5) Pemasangan spanduk kewaspadaan PMK di Wilker Ampana.
  - 6) Pemasangan spanduk kewaspadaan PMK di Wilker Tolitoli & Pelabuhan Dede.

- 7) Pemasangan spanduk kewaspadaan di Bandara Mutiara Sis Aljufri.
- e. Kegiatan penyemprotan disinfektan pada sapi Di IKH BKP Palu
- 1) Kegiatan pemeriksaan dan penyemprotan disinfektan pada sapi di IKH Pemilik di Toili, Kab. Banggai.
  - 2) Kegiatan pengawasan saat awal pemberlakuan masa karantina di IKH BKP Palu.
  - 3) Penerapan karpet disinfektan di Bandara Mutiara Sis Aljufri.

## **2. Paparan Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah**

- a. Kondisi PMK di Pulau Sulawesi
- 1) Sejak tanggal 8 Juli 2022, ternak kerbau terkonfirmasi positif di Kab. Toraja Utara, disusul ternak suspek PMK di Tana Toraja 28 ekor, Toraja Utara 110 ekor, Bone 4 ekor, Kab. Bantaeng 10 ekor, dan Jeneponto 2 ekor.
  - 2) Hal ini menandakan Pulau Sulawesi bukan zona hijau lagi, sudah zona kuning sehingga Sulteng yang berada satu daratan dengan wilayah Tana Toraja Prov. Sulawesi Selatan otomatis menjadi daerah terancam.
  - 3) Pelaksanaan investigasi dan surveilans terkait laporan gejala klinis PMK yang dilaporkan oleh Kab. Morowali dan Kab. Donggala sudah ditindaklanjuti oleh Tim Investigasi Balai Besar Veteriner Maros dan Disbunnak Sulawesi Tengah. Dari hasil ujinya tersebut menunjukkan negatif dan hingga saat ini masih zero kasus.
- b. Kebijakan Pemda Sulawesi Tengah terkait Kewaspadaan PMK
- 1) Surat edaran Sekretaris Provinsi Prov. Sulteng perihal peningkatan kewaspadaan terhadap PMK tanggal 10 Mei 2022.
  - 2) SK Gubernur Sulawesi Tengah tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Wabah PMK di Sulteng tanggal 20 Mei 2022.
  - 3) Surat Kadisbunnak tentang SOP Lalu lintas Pengeluaran/ Pemasukan Hewan Peka PMK tanggal 24 Mei 2022.

- 4) Surat edaran Gubernur Sulteng perihal pemberlakuan *lockdown* penyebaran PMK dengan melarang pengeluaran dan pemasukan hewan rentan PMK ke wilayah kabupaten/kota tanggal 11 Juli 2022.
  - 5) Surat Gubernur Sulawesi Tengah ditujukan kepada Bupati/Walikota, Kapolda Sulteng, Danrem 132 Tadulako, dan Kejati Sulteng perihal Bantuan Pengamanan Pos Terpadu POLRI, TNI, dan Satpol PP untuk Cetak Penutupan di Lintas Batas, tanggal 11 Juli 2022.
- c. Tindak Lanjut Dinas Provinsi/Bidang Keswan Kesmavet
- 1) Membentuk Pusat Layanan Aduan PMK yang dikoordinir Bidang Keswan Kesmavet dan Pejabat Otovet Provinsi Sulawesi Tengah.
  - 2) Berkoordinasi dengan Polda Sulteng, Karantina Hewan Kelas II Palu, Korem 132 Tadulako, dan Satgas PMK Provinsi.
  - 3) Intensifkan KIE PMK lewat grup WA provinsi maupun kabupaten/kota.
  - 4) Melakukan surveilans dan investigasi bersama BBVet Maros.
  - 5) Memantau laporan harian kondisi PMK di wilayah Sulteng oleh Koordinator Isikhnas Provinsi.
  - 6) Penyebaran spanduk dan leaflet terkait PMK oleh UPT veteriner.
  - 7) Sosialisasi PMK kepada Camat dan Lurah se-Kota Palu.
  - 8) Pertemuan Petugas Sikomandan untuk tetap melayani akseptor di lapangan sepanjang bebas PMK.
  - 9) Mengajukan fasilitasi rakor, operasional, dan obat vitamin desinfektan pada APBD perubahan.
- d. Tindak Lanjut di Lapangan
- 1) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan keswan kabupaten/kota:
    - a) Melaporkan situasi terkini PMK di wilayahnya kepada Bupati/Walikota, Polres, dan Kodim setempat.



- b) Berkoordinasi, baik dengan lintas sektor terkait pengamanan pemasukan dan pengeluaran di *check point* serta mengaktifkan petugas di lapangan.
  - c) Memfasilitasi dan mengalokasikan anggaran untukantisipasi pencegahan PMK meliputi obat, vitamin, pakan konsentrat, desinfektan, serta operasional di lapangan.
- e. Permasalahan
- 1) Belum efektifnya *check point*/pos lalin di perbatasan antarprovinsi, dan masih ada pelabuhan tikus/ilegal yang luput dari pengawasan di wilayah kabupaten/kota.
  - 2) Terbatasnya petugas dan sarana prasarana di lokasi *check point*.
  - 3) Belum adanya alokasi dana penanganan PMK di lapangan meliputi obat, vitamin, desinfektan, dan operasional pengendalian di lapangan.
  - 4) Belum terbentuknya Satuan Gugus Tugas PMK di kabupaten/kota.
- f. Kebutuhan Operasional Pencegahan dan Penanggulangan PMK Kebutuhan Pelayanan Kesiapsiagaan Wabah di UPT Veteriner (Total Rp13.315.090.000,00)
- 1) Belanja Bahan-Bahan Kimia = Rp225.470.000,00.
  - 2) Belanja Obat-Obatan Lainnya = Rp338.800.000,00.
  - 3) Belanja Pelindung Diri di Lapangan = Rp34.410.000,00.
  - 4) Belanja Bahan-Bahan Lainnya = Rp43.500.000,00.
  - 5) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Operasional) = Rp117.000.000,00.
  - 6) Belanja Jasa Tenaga Medik Veteriner & Paramedik = Rp12.599.410.000,00.
- g. Kebutuhan Operasional Pencegahan dan Penanggulangan PMK
- 1) Kebutuhan Pelayanan Kesiapsiagaan Wabah di UPT Veteriner = Rp13.315.090.000,00

2) Kebutuhan Pelayanan Kesiapsiagaan Wabah di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner = Rp1.312.482.500,00

Total = Rp14.627.572.500,00.

h. Kebutuhan Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara

1) Pengembangan peternakan melalui desa korporasi di lokasi KPN meliputi Kab. Donggala, Kab. Sigi, Kab. Poso, Kab. Parimo, dan Kab. Toli-Toli.

2) Penanaman hijauan makanan ternak yang unggul berkualitas di lokasi padang penggembalaan di Kab. Poso, Kab. Sigi, dan Kab. Buol.

3) Pembangunan sarana prasarana meliputi Rumah Potong Hewan, pasar hewan, kandang koloni, dan lain-lain.

i. Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara Tahun 2023:

No	Permasalahan	Usulan	Besaran Anggaran (Rp)
1	A. Pengembangan Sapi Potong pada Wilayah KPN	1000 Ekor Sapi Potong @Rp20.000.000,00	20.000.000,00
	Belum adanya Agroeduwisata Peternakan Berkelanjutan	Kandang Koloni 10 Unit @Rp200.000.000,00	2.000.000.000,00
	Dari 850 Ha baru 5% yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Introduksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang unggul 400 ha @Rp3.500.000,00	1.400.000.000,00
		Vitamin dan Obat obatan (1 Paket)	50.000.000,00
		HOK, CPCL, dan Monev (1 Paket)	100.000.000,00
	B. Pengembangan Sapi Potong pada Wilayah Penyangga KPN		
	Populasi Sapi Potong di Kecamatan Dampelas sejumlah 9.400 ekor	Penguatan SIKOMANDAN (Optimalisasi IB, PKB, Kelahiran) 1 Paket	500.000.000,00
		Penanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT) 50 ha @Rp3.500.000,00	175.000.000,00
		Pembinaan Teknis dan Monev (1 Paket)	100.000.000,00

2	Pengembangan Kelapa Dalam Butuh Peremajaan karena tanaman sekarang sebagian besar tidak Produktif	150 ha Kelapa dalam @100 pohon/ha @Rp20.000,00	300.000.000,00
		Kebutuhan Pupuk @Rp10.000.000,00/ha	1.500.000.000,00
		Kebutuhan Alsin @Rp150.000.000,00/ha	2.250.000.000,00
		HOK, CPCL, dan Monev (1 Paket)	100.000.000,00
3	Pengembangan Kelapa Genjah	10 ha Kelapa Genjah @100 Pohon/ha @Rp20.000,00	20.000.000,00
		Kebutuhan Pupuk @Rp10.000.000,00/ha	100.000.000,00
		Kebutuhan Alsin @Rp15.000.000,00/ha	1.500.000.000,00
		HOK, CPCL, dan Monev (1 Paket)	100.000.000,00

j. Data Uji PMK Balai Veteriner

**DATA HASIL PENGUJIAN REAL TIME PCR PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA SPESIMEN HEWAN DALAM RANGKA INVESTIGASI LABORATORIUM BALAI BESAR VETERINER MAROS PER TANGGAL 14 JULI 2022**

Tanggal terima Sampel	Propinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Hewan	Jumlah Ternak Yang Diambil (ekor)	Jumlah ternak yang diuji Positif PMK	Jumlah sampel	Hasil Uji PCR PMK Sampel		ID iSikhnas	Keterangan
									Positif	Negatif		
20 Mei 2022	Sulawesi Selatan	Bulukumba	Bontotiro	Bontu Marannu	Sapi	1	0	2	0	2		Laporan WA
22 Juni 2022	Sulawesi Barat	Polman	Campalagian	Sumarang	Kambing	9	0	22	0	22	31701147	Tanda Umum
1 Juli 2022	Sulawesi Tengah	Morowali	Bungku Tengah	Tofutai	Kambing	6	0	18	0	18	31883002	
7 Juli 2022	Sulawesi Selatan	Toraja	Makale	Tondon Mamullu	Babi	4	0	4	0	4	32097065	
					Kerbau	9	8	18	10	8		
7 Juli 2022	Sulawesi Selatan	Toraja Utara	Tallunglipu	Tallung Lipu Matallo	Kerbau	7	7	13	12	1	32097925	
8 Juli 2022	Sulawesi Selatan	Bantaeng	Bantaeng	Karatuang	Kambing	4	0	4	0	4	32071961	
					Sapi	5	2	6	2	4	32071961	
8 Juli 2022	Sulawesi Selatan	Gowa	Somba Opu	Samata	Sapi	2	0	4	0	4		Laporan WA
11 Juli 2022	Sulawesi Selatan	Bone	Patimpeng	Masago	Sapi	3	3	8	8	0	32112021	
				Massila	Sapi	5	5	9	9	0	32112013	
11 Juli 2022	Sulawesi Selatan	Makassar	Manggala	Antang	Sapi	1	1	2	1	1		
12 Juli 2022	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Bangkala Barat	Pattiro	Kerbau	6	6	7	7	0	32135410	
				Batang Bungeng	Sapi	1	1	3	2	1	32122871	
13 Juli 2022	Sulawesi Selatan	Gowa	Somba Opu	Sungguminasa	Sapi	1	1	4	3	1		Laporan WA
14 Juli 2022	Sulawesi Selatan	Luwu	Bassesangtempe	Pantilan	Kerbau	5	5	9	7	2		Laporan WA
<b>Total</b>						<b>69</b>	<b>39</b>	<b>133</b>	<b>61</b>	<b>72</b>		

### 3. Paparan Walikota Palu

- Peternakan dengan sistem dilepas menyebabkan penyebaran PMK lebih cepat, sehingga perlu ada edaran untuk sementara ternak dilakukan isolasi.
- Pemerintah Kota Palu akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan akan menempatkan petugas di pintu keluar-masuk ternak.

#### 4. Paparan Bupati Tolitoli

Tolitoli memiliki lahan pertanian yang cukup luas namun masih memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih memadai sehingga bisa maksimal dalam pengembangan dan meningkatkan hasil produksi serta perlu dukungan pengolahan hasil produksi.

#### 5. Paparan Perum BULOG

##### a. Rencana Pemenuhan Suplai Daging Kerbau Sebagai Substitusi Daging Sapi



Dari total PI sebanyak 100.000 ton sudah direalisasikan sebanyak 50.204 ton (per 04 Juli 2022).



Percepatan jadwal kedatangan daging kerbau India Tahap XXVII Tahun 2022 sebanyak 51.512 ton.

No	Rincian	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	JUMLAH (TON)
1	Sebelum Adendum	588	12.040	10.192	10.332	10.136	5.572	2.352	51.212
2	Sesudah Adendum	588	11.984	12.992	13.776	11.872	-	-	51.212

• Rencana percepatan pemasukan daging kerbau beku impor dari India menyebabkan adanya kekosongan pemasukan pada bulan November dan Desember 2022, sehingga di usulkan tambahan kuota impor daging kerbau beku dari India sebesar 20.000 ton yang direncanakan masuk pada bulan November sebesar 15.000 ton dan Desember sebesar 5.000 ton. Tambahan impor 20.000 ton sekaligus sebagai rencana penyediaan tambahan stok pada daging pada awal tahun 2023.


##### b. Realisasi Importasi Daging Kerbau Tahun 2022 Per 4 Juli 2022

NO	RINCIAN	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	JUMLAH (TON)
1	RENCANA	10.976	9.436	14.504	13.832	3.164	9.408	12.992	13.776	11.872	99.960
2	REALISASI	5.880	13.412	6.608	19.264	3.836	1.204	-	-	-	50.204
3	SISA	-	-	-	-	-	11.116	12.992	13.776	11.872	49.756


Terhadap penugasan impor daging kerbau sebanyak 100.000 ton telah seluruhnya mendapatkan Persetujuan Impor dari Kemendag RI yg terbit dalam 3 (tiga) Persetujuan Impor dan seluruhnya sudah dilakukan kontrak dengan supplier, periode kedatangan barang bertahap sampai dengan bulan Oktober 2022.

Realisasi penerimaan impor sampai dengan hari sebanyak 50.204 ton atau 50,20% dari kuota impor


##### c. Alur Proses Produksi Daging Kkerbau Beku




**1**  
Ternak yang di kirim ke pabrik produksi daging beku memiliki *eartag* yang merupakan identitas dan sarana *traceability* produksi menyimpan informasi asal ternak, riwayat vaksin, dan kondisi kesehatan ternak. bebas dari penyakit PMK.



**2**  
Kondisi kandang bersih dan diawasi oleh dokter hewan. Hewan tidak layak dipotong biasanya dikarenakan hewan sedang mengandung/ bunting.



**3**  
Proses pemotongan dilakukan secara syariah Islam dan dalam kondisi bersih. Setelah pemotongan dilakukan proses pengantungan dan pengulitan oleh pekerja yang telah ahli



**4**  
Proses pengemasan primer dan sekunder dilakukan dengan *Quality Control* yang ketat. Setelah itu, daging akan dibekukan di *cold storage* sebelum dilakukan pengiriman.

Hal-hal terkait penurunan PH di RPH Negara Asal Upaya dari para *supplier* India untuk menghilangkan resiko adanya virus PMK,

maka dilakukan proses pelayuan daging sebelum deboning, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) pH harus di bawah 6 (enam). Pada kondisi ini, virus secara *nature* tidak dapat hidup.
- 2) BULOG mewajibkan seluruh *supplier* utk menjamin daging yang telah dibekukan memiliki pH di bawah 6 (enam).
- 3) Untuk memastikan pH sesuai ketentuan, BULOG menunjuk SGS untuk memastikan hal tersebut dengan memberikan statemen dalam dokumen *inspection certificate*.
- 4) Pada saat, Tim BULOG melakukan observasi dan supervisi ke *supplier*, berkesempatan menguji kadar pH secara acak dengan hasil di bawah 6 (enam).

d. Dokumen Pendukung untuk *Handling* Daging Kerbau di Indonesia



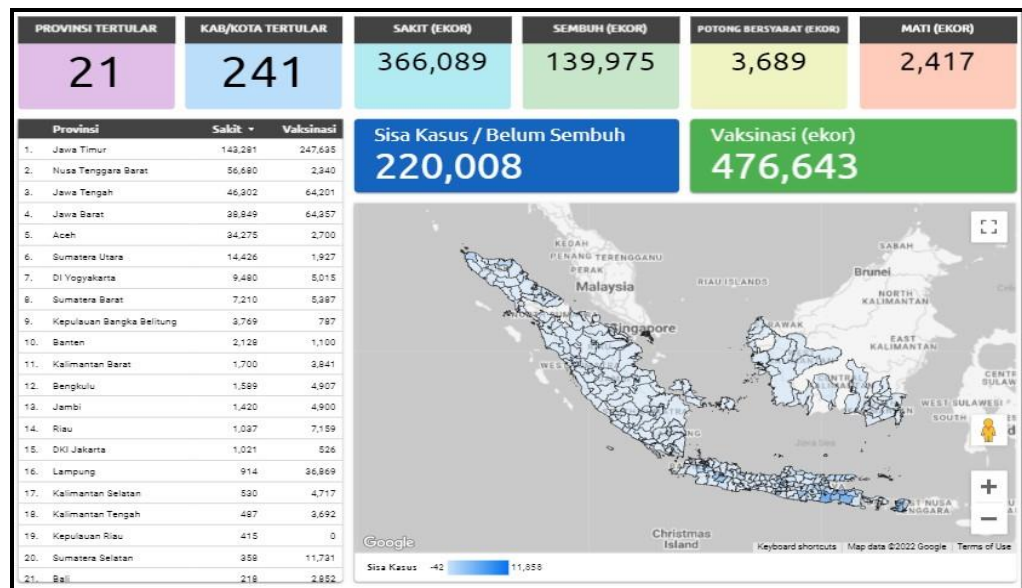
e. Ketersediaan Stok Daging Kerbau dan Daging Sapi Kantor Wilayah Sulawesi tengah

NO	UNIT KERJA	Daging Kerbau	Daging Sapi	TOTAL
1	Kanwil Sulteng	9.96	-	9.96
2	Kanca Poso	-	-	-
3	Kanca Luwuk	-	-	-
4	Kanca Toli-Toli	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.96</b>	<b>-</b>	<b>9.96</b>

f. Posisi Persediaan Beras CBP Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

NO	UNIT KERJA	BERAS CBP	BERAS KOMERSIAL	TOTAL
1	Kanwil Sulteng	7,355	157	7,512
2	Kanca Poso	3,867	-	3,867
3	Kanca Luwuk	2,476	-	2,476
4	Kanca Toli-Toli	2,188	1	2,189
	<b>JUMLAH</b>	<b>15,885</b>	<b>158</b>	<b>16,043</b>

## 6. Paparan ID Food



Peta Penyebaran Kasus PMK, Ternak, & Stok Daging ID Food Terdapat Sapi Berdikari di Subang terindikasi PMK 21 ekor

a. Penanganan di Kandang:

- 1) Sapi *suspect* PMK: diisolasi & diberikan pengobatan.
- 2) Sapi *suspect* PMK dengan gejala kuat: dipotong.
- 3) Sapi sehat: diberikan vaksinasi.

b. Jumlah Ternak Ruminansia PT Berdikari:

TERNAK	JAWA BARAT	SULAWESI	JUMLAH
Sapi	1.136 ekor	104 ekor	1.240 ekor
Domba	40 ekor	-	40 ekor
	1.176 ekor	104 ekor	1.280 ekor

c. Jumlah Stok Daging PT Berdikari:

- 1) Stok Daging: 58,3 Ton (lokasi *Cold Storage* Jakarta & Bekasi (sewa).
- 2) Diperlukan sekitar  $\pm 100.000$  ekor sapi untuk menjaga stok dan harga sapi sebagai antisipasi berkurangnya produksi domestik akibat PMK.

d. Langkah antisipatif PT Berdikari dalam menjaga ketersediaan dan harga sapi:

- 1) Pencegahan:
  - a) Dokter hewan selalu melakukan pemeriksaan secara

berkala.

- b) Melarang selain karyawan masuk ke area kandang.
- c) Karyawan yang masuk area kandang wajib spray desinfektan.
- d) Membatasi lalu lintas barang, kendaraan, dan tindakan desinfeksi kendaraan.
- e) Desinfeksi kandang, material, dan area lingkungan kandang berkala.
- f) Pelarangan pemasukan ternak dari daerah tertular PMK.


2) Pengendalian:

- a) Tindakan karantina bagi ternak yang sakit
- b) Treatment ternak (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
- c) Laporan perkembangan ternak yang dikarantina.
- d) Apabila ada yang terindikasi tertular PMK, segera lapor ke perusahaan dan dinas peternakan setempat.

e. Pencegahan PMK di Kandang PT Berdikari:

- 1) Desinfeksi rutin dalam kandang.
- 2) Desinfeksi rutin luar kandang.
- 3) Pemberian obat anticacing.
- 4) Pemberian vitamin B kompleks untuk meningkatkan imunitas.
- 5) Pembatasan lalu lintas orang. Customer memakai jas hujan ketika memilih ternak.

f. Data *Cold Storage* BUMN:

Perusahaan	Jenis	Jumlah Cold Storage	Kapasitas	Terpakai	Tersedia	Ket.
	Permanen cold Storage	23 unit	8.592 ton	50%	50%	SKP hanya utk ikan
	Mobile cold storage	13 unit	400 ton	0	100%	
<b>TOTAL IDFOOD</b>		36 unit	8.992 ton	4.696 ton	4.296 ton	
<b>SWASTA</b>		1.714 unit	2,460 juta ton			

Keterangan:

- Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia tahun 2020.
  - *Cold storage* Perindo hanya memiliki izin untuk penyimpanan ikan.
  - Daging dan ikan tidak bisa disimpan dalam satu *cold storage*.
  - *Mobile Cold Storage* dapat ditambah jumlahnya sesuai kebutuhan.
- g. Perkembangan penyediaan daging sapi impor oleh PT Berdikari:
- 1) Persetujuan impor Kemendag RI 20.000 ton daging sapi dari Brasil di tahun 2022.
  - 2) ETA s.d. 31 Juli 2022, progress kedatangan 5.946 ton (29,7% dari rencana total).
  - 3) Rencana Agustus-Desember 2022 menunggu fiksasi ETA *Full Container Loaded* (FCL) daging sapi Brasil.
  - 4) Percepatan importasi dilakukan dengan melobi vendor di Brasil untuk percepatan ETA FCL.
  - 5) Estimasi harga daging *selling* Rp90.000,00/kg.
- h. Dukungan yang dibutuhkan:
- 1) Kementerian Perdagangan, adalah kebijakan penugasan kekuatan stok daging (impor) melalui BUMN, antisipasi kekurangan pasokan akibat dampak wabah PMK.
  - 2) Kementerian Pertanian, adalah *ID Food* dapat berpartisipasi dalam percepatan distribusi vaksin PMK.

## 7. PT Pupuk Indonesia

- a. Kebutuhan Pupuk vs Alokasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022:

NO	JENIS PUPUK	2022			
		USULAN	ALOKASI	GAP	%
		1	2	3(1-2)	4(2:1)
1	UREA	65.362	35.456	29.906	54%
2	SP-36	2.935	1.752	1.183	60%
3	ZA	2.794	2.138	656	77%
4	NPK PHONSKA	105.803	28.554	77.249	27%
5	NPK KAKAO	12.806	1.887	10.919	15%
6	ORGANIK GRANUL	76.006	5.507	70.499	7%
<b>TOTAL</b>		<b>265.706</b>	<b>75.294</b>	<b>190.412</b>	<b>28%</b>



b. *History* Penyaluran Provinsi Sulawesi Tengah 3 Tahun Terakhir

NO	JENIS PUPUK	2020			2021			2022		
		REALISASI	ALOKASI	%	REALISASI	ALOKASI	%	REALISASI SD 12 JUL 22	ALOKASI	%
1	UREA	38.871	38.871	100%	31.171	42.891	73%	19.994	35.456	56%
2	SP-36	1.446	1.727	84%	1.709	2.086	82%	528	1.752	30%
3	ZA	5.884	6.597	89%	5.800	6.083	95%	613	2.138	29%
4	NPK PHONSKA	27.690	29.377	94%	30.440	30.492	100%	19.595	28.554	69%
5	NPK KAKAO	2.563	5.725	45%	3.048	3.719	82%	1.319	1.887	70%
6	ORGANIK GRANUL	1.249	2.080	60%	1.358	1.620	84%	751	5.507	14%
<b>TOTAL</b>		<b>77.703</b>	<b>84.377</b>	<b>92%</b>	<b>73.526</b>	<b>86.891</b>	<b>85%</b>	<b>42.801</b>	<b>75.294</b>	<b>57%</b>

Keterangan:

Rendahnya serapan Pupuk Bersubsidi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 dikarenakan adanya Permentan Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, dimana Aloksi Pupuk Bersubsidi Provinsi Sulawesi Tengah semula sebesar 81.854 ton menjadi 86.891 ton.

c. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Sulawesi Tengah  
Update: 30 Jun 2022

NO	JENIS PUPUK	JUNI			S.D JUNI			2022	
		REALISASI PENJUALAN	SK DINAS	%	REALISASI PENJUALAN	SK DINAS	%	SK DINAS	%
		1	2	3(1:2)	4	5	6(4:5)	7	8(4:7)
1	UREA	4.038	2.482	163	18.424	18.792	98	35.456	52
2	SP-36	252	123	206	528	929	57	1.752	30
3	ZA	203	150	136	613	1.133	54	2.138	29
4	NPK PHONSKA	3.418	1.999	171	18.364	15.134	121	28.554	64
5	NPK FORMULA KHUSUS	331	132	251	1.279	1.000	128	1.887	68
6	ORGANIK GRANUL	161	385	42	751	2.919	26	5.507	14
<b>TOTAL</b>		<b>8.403</b>	<b>5.271</b>	<b>159</b>	<b>39.960</b>	<b>39.906</b>	<b>100</b>	<b>75.294</b>	<b>53</b>

d. Stok Pupuk Subsidi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Update: 12 Juli 2022

NO	JENIS PUPUK	2022		
		STOK	KETENTUAN STOK	%
1	UREA	11.528	5.895	196%
2	SP-36	83	828	10%
3	ZA	226	2.208	10%
4	NPK PHONSKA	6.242	8.375	75%
5	NPK KAKAO	940	335	280%
6	ORGANIK GRANUL	10	995	1%
<b>TOTAL</b>		<b>19.029</b>	<b>18.636</b>	<b>102%</b>

- e. Kendala dan Hambatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Sulawesi Tengah:
  - 1) Penerapan aturan odol pada angkutan muatan barang berpengaruh pada ketersediaan stok di gudang lini III.
  - 2) Kelangkaan BBM solar masih terjadi di beberapa daerah, berpengaruh pada ketersediaan stok di gudang lini III.
  - 3) Implementasi penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani masih rendah.
- f. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Panja:
  - 1) Menghitung potensi penyaluran pupuk SP-36, ZA, & Organik tahun 2022 untuk mengusulkan kepada Kementerian Pertanian sebagai dasar penetapan angka alokasi pada reisi Permentan Nomor 41 Tahun 2021.
  - 2) Melakukan rekonsiliasi data salur & stok pupuk SP-36, ZA, & Organik tahun 2022 dengan Mitra Bisnis Anak Perusahaan sebagai dasar stok opname sebelum disampaikan kepada Kementerian Pertanian.
  - 3) Bagi distributor yang berdampak atas kebijakan pengurangan jenis pupuk, maka akan dipertimbangkan untuk menjadi distributor retail.

### **III. KESIMPULAN**

1. Komisi IV DPR RI mendorong agar dilakukan pembenahan dan perluasan terhadap pelabuhan perikanan wilayah I Donggala dalam rangka mendukung kebutuhan ikan Ibu Kota Baru;
2. Komisi IV DPR RI menodornng Pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap fasilitas pelabuhan dalam rangka mendukung pengembangan sektor perikanan di Donggala;
3. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Pemerintah yang akan melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur Pelabuhan Wilayah I Donggala;

4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan BBM bagi nelayan, karena hal tersebut akan sangat berdampak pada kehidupan nelayan;
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas perusahaan yang melakukan penambangan tanpa dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan dan dokumen persetujuan penggunaan kawasan hutan (penambangan di dalam kawasan hutan) di Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya;
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencegah, mengawasi, dan menyelidiki serta menindak tegas perusahaan pertambangan apabila dalam kegiatan menambang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban lingkungan di Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya;
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan bahan terkait permasalahan kuota PPKH di Kabupaten Morowali. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melaksanakan RDP melalui Panja Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan dengan Kementerian LHK, dalam rangka menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti permintaan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait permohonan penurunan status lahan hutan yang telah diolah atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perkebunan dan kebutuhan lainnya serta permohonan untuk kebutuhan stabilitas pertahanan dan keamanan Kompi Senapan B.
9. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena sejauh ini masih aman dari kasus PMK. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk fokus dalam penanganan PMK agar cepat terkendali;

10. Komisi IV DPR RI berharap ternak di Provinsi Sulawesi Tengah tidak terjangkau PMK sehingga dapat menyuplai daging daerah lain.
11. Komisi IV DPR RI meminta dinas terkait di Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberi atensi dalam melakukan pencegahan masuknya PMK di Sulawesi Tengah;
12. Komisi IV DPR RI mendorong apabila ada ternak yang terjangkau PMK agar segera dimusnahkan, agar tidak menyebar;
13. Komisi IV DPR RI meminta dilakukan pendataan arus lalu lintas ternak dan sudah saatnya dilakukan pengawasan menggunakan teknologi;
14. Komisi IV DPR RI mendorong RNI//ID *Food* untuk bekerja sama dengan masyarakat, mengutamakan pembelian ternak rakyat, baru melakukan impor;
15. Komisi IV DPR RI meminta Badan Karantina Pertanian untuk melakukan evaluasi karena PMK masuk dari luar.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan mitra Komisi IV DPR RI lainnya.

Ketua Tim,

Ttd.

Rusdi Masse Mappasessu  
A-398

## LAMPIRAN BEBERAPA PUBLIKASI MEDIA

### A. Liputan Kegiatan di Media

#### I. Kunjungan ke UPT Pelabuhan Perikanan Perikanan Wilayah I Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala.

- ✓ <https://banggaipost.com/9039/komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-sulteng-ini-agendanya/>
- ✓ <https://online24jam.com/2022/07/15/berkunjung-ke-sulteng-wakil-ketua-komisi-iv-dpr-rusdi-masse-dorong-pembenahan-infrastruktur-pelabuhan-di-donggala/>
- ✓ <https://sultengraya.com/read/136581/komisi-iv-dpr-ri-serap-aspirasi-nelayan-donggala/>
- ✓ <https://nasdem.id/2022/07/19/nasdem-dorong-optimalisasi-sektor-perikanan-di-donggala/>
- ✓ <https://channelsulawesi.id/2022/07/15/komisi-iv-dpr-ri-jaring-aspirasi-di-upt-pelabuhan-perikanan-wilayah-i-sulteng/>
- ✓ <https://sultengprov.go.id/2022/07/11/asisten-iii-bidang-administrasi-umum-pimpin-rapat-persiapan-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-ke-sulteng/>
- ✓ <https://mediaindonesia.com/nusantara/507486/komisi-iv-dpr-ri-dorong-optimalisasi-sektor-perikanan-di-donggala>
- ✓ <https://nasional.tempo.co/read/1613256/komisi-iv-perlu-dukungan-infrastruktur-untuk-nelayan-donggala>
- ✓ <https://kumparan.com/paluposo/kunjungi-pelabuhan-perikanan-donggala-komisi-iv-dpr-ri-singgung-soal-izin-1ySlezLnP1D>
- ✓ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39841/t/Komisi+IV+Dukung+Pengu+atan+Infrastruktur+Bagi+Nelayan+Donggala>

#### II. Diskusi Pengelolaan Lingkungan PT Vale Indonesia dan Kabupaten Morowali, di Hotel Santika Palu.

- ✓ <https://penasultra.id/pt-vale-akan-terapkan-good-mining-practice-sorowako-di-blok-bahodopi/>
- ✓ <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pt-vale-indonesia-akan-terapkan-good-mining-practice-sorowako-di-blok-bahodopi-1yTpeXwy6De>
- ✓ <https://portalmedia.id/read/582/di-hadapan-komisi-iv-dpr-ri-pt-vale-blok-bahodopi-tetap-terapkan-good-mining-practice>
- ✓ <https://industri.kontan.co.id/news/vale-indonesia-operasi-berbasis-keberlanjutan-akan-diterapkan-di-blok-bahodopi>
- ✓ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39839/t/Legislator+Minta+Kegiatan+Pertambangan+Di+Morowali+Harus+Sesuai+Aturan>

- ✓ <https://www.tambang.co.id/ke-komisi-iv-dpr-vale-blok-bahodopi-bakal-terapkan-good-mining-practice>
- ✓ <https://palopopos.fajar.co.id/2022/07/17/di-hadapan-komisi-iv-dpr-ri-pt-vale-sampaikan-akan-terapkan-good-mining-practice-sorowako-di-blok-bahodopi/>
- ✓ <https://makassar.sindonews.com/read/828691/712/di-depan-komisi-iv-dpr-ri-pt-vale-tegaskan-komitmen-terapkan-praktik-tambang-berkelanjutan-1658023648>
- ✓ <https://www.sulselsatu.com/2022/07/17/ekonomi/di-hadapan-komisi-iv-dpr-ri-pt-vale-berkomitmen-akan-terapkan-good-mining-practice-sorowako-di-blok-bahodopi.html>
- ✓ <https://www.lintasparden.com/dpr-menyual-tambang-nikel-di-morowali-eksploitasi-berlebihan-yang-rugikan-rakyat/>
- ✓ <https://referensia.id/pt-vale-komitmen-terapkan-good-mining-practice-di-blok-bahodopi-morowali/2/>
- ✓ <https://pedomanrakyat.com/komisi-iv-dpr-ke-sulteng-rusdi-masse-dudukkan-semua-pihak-bahas-pengelolaan-lingkungan-hidup-wiup-pt-vale/>

### **III. Kunjungan dan Diskusi Mengenai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak dan Ketahanan Pangan di Balai Karantina Pertanian Palu.**

- ✓ <https://pedomanrakyat.com/kunjungi-balai-karantina-pertanian-palu-rombongan-komisi-iv-dpr-ri-bicara-penanganan-wabah-pmk-hewan-ternak/>
- ✓ <https://pedomanrakyat.com/kunjungi-balai-karantina-pertanian-palu-rombongan-komisi-iv-dpr-ri-bicara-penanganan-wabah-pmk-hewan-ternak/>
- ✓ <https://www.kabarselebes.id/berita/2022/07/16/terima-kunjungan-komisi-iv-dprd-ri-wali-kota-palu-pmk-harus-cepat-ditangani/>
- ✓ <https://www.pilar.id/komisi-iv-dpr-ri-pantau-kesiapan-provinsi-sulawesi-tengah-tangani-pmk/>
- ✓ <https://palu.tribunnews.com/2022/07/16/kunjungan-komisi-iv-dpr-ri-kepala-bkp-palu-paparkan-titik-rawan-masuknya-pmk-di-sulteng>
- ✓ <https://www.antaraneews.com/berita/2999305/komisi-iv-dpr-ri-pantau-kesiapan-pencegahan-pmk-di-sulteng>
- ✓ <https://www.sultengnews.com/pertemuan-komisi-iv-dpr-ri-di-balai-karantina-pertanian-wali-kota-palu-usulkan-ternak-di-kandangkan/>
- ✓ <https://paluekspres.fajar.co.id/2022/07/15/reses-di-sulteng-hari-ini-komisi-iv-dpr-ri-ke-balai-karantina-pertanian-palu/>
- ✓ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39843/t/Andi+Akmal+Pasluddin+Minta+Pemerintah+Hati-Hati+Hadapi+Potensi+Ancaman+PMK+di+Sulawesi+Tengah>

## B. Dokumentasi



Kunjungan dan Diskusi mengenai Perizinan, Penangkapan Ikan Terukur, dan Ketersediaan Stok BBM bagi Nelayan di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I



Diskusi terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Vale Indonesia Tbk, bertempat di Hotel Santika Palu



Kunjungan dan Diskusi mengenai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak dan Ketahanan Pangan di Balai Karantina Pertanian Palu